

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan. Adapun pokok permasalahan penelitian ini yaitu Apa tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ? dan Bagaimana kedepannya tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjanlankan sistem kelembagaan negara ?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, yaitu penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif untuk melihat adanya konflik hukum, kekosongan hukum atau kekaburan norma. Artinya penelitian ini terangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dan metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melalui seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktis, agar penelitian ini bisa diantisipasi untuk memberikan kontribusi dan gagasan pemikiran mengenai suatu kedudukan lembaga negara bantu, khususnya mengenai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang secara jelas sudah diatur berdasarkan Undang-Undang. Hasil penelitian diketahui bahwa lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Pengaturan tentang Komisi Penyiaran Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran belum memadai bagi KPI dalam melaksanakan fungsi dan fungsi. Hal ini disebabkan karena belum diaturnya secara komprehensif tugas dan fungsi KPI dalam Undang-Undang tentang Penyiaran.

Kata Kunci: Fungsi, Komisi Penyiaran Indonesia, Tugas.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the duties and functions of the Indonesian Broadcasting Commission because it is a state agency that assists in the state administration system. The main problem of this research is what are the duties and functions of the Indonesian Broadcasting Commission according to Law Number 32 of 2002 concerning Indonesian Broadcasting as an auxiliary state institution in the constitutional system of the Republic of Indonesia? and What are the future duties and functions of the Indonesian Broadcasting Commission in carrying out the state institutional system? To answer this problem, the writer uses a normative juridical type of research to see whether there are legal conflicts, legal vacuums or unclear norms. This means that this research is raised from the existence of legal issues by analyzing a legal issue through legislation, literature and other reference materials. This thesis uses several approaches including conceptual approach, statutory approach, case approach, historical approach. The legal materials used in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. And the method of processing legal materials is carried out through data selection, data classification, and data systematics. The benefits of this research are theoretical and practical benefits, so that this research can be anticipated to provide contributions and ideas regarding the position of auxiliary state institutions, especially regarding the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) which is clearly regulated by law. The results of the research show that independent state agencies regulate matters regarding broadcasting. The regulation regarding the Indonesian Broadcasting Commission in Law Number 32 of 2002 on Broadcasting is not sufficient for the KPI to carry out its functions and functions. This is because the duties and functions of the KPI have not been comprehensively regulated in the Law on Broadcasting.

Keywords: *Duties, and Functions, Indonesian Broadcasting Commission.*